

RINGKASAN EKSEKUTIF

15

Rekomendasi
Paket Kebijakan

untuk Mendukung Agenda Pembangunan
Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029



IBC

Indonesian Business Council

15

Rekomendasi
Paket Kebijakan

*untuk Mendukung Agenda Pembangunan
Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029*

Dokumen lengkap dapat diakses
dengan memindai kode QR berikut



Ringkasan Eksekutif

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024 - 2029. Dengan visi membawa Indonesia menjadi negara maju, terutama dalam konteks ekonomi global dan geopolitik yang semakin dinamis dan penuh tantangan, pemerintahan ini perlu berfokus pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan sistem pertahanan dan keamanan yang berkesinambungan. Terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran menandai momentum untuk mengakselerasi upaya mewujudkan visi Indonesia yang lebih berdaya saing. Periode kepemimpinan ini tidak hanya membawa harapan baru, tetapi juga tanggung jawab besar untuk merealisasikan aspirasi kolektif seluruh rakyat Indonesia.

Menuju usia 100 tahun pada proklamasi kemerdekaan tahun 2045, Indonesia memiliki cita-cita untuk mewujudkan "Indonesia Emas" pada atau sebelum tahun tersebut. Untuk itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tersebut, diperlukan penguatan peran pemerintah dan pembangunan bangsa berdasarkan falsafah Pancasila. Menyikapi hal ini, Prabowo-Gibran menghadirkan visi **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**, yang diwujudkan melalui 8 Misi Utama atau Asta Cita, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), 17 Program Prioritas, serta Program Kerja lainnya.

Menyambut periode kepemimpinan baru, *Indonesian Business Council* (IBC) telah menyusun buku putih berjudul "**15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024 - 2029**." Dokumen ini memetakan situasi dan tantangan di berbagai bidang serta memberikan usulan rekomendasi paket kebijakan sebagai alat bantu bagi pasangan pemimpin terpilih dalam menjalankan pemerintahan kedepan.

Kami telah mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang patut diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Penting untuk menemukan solusi atas tantangan-tantangan ini demi kelancaran dan kesuksesan pemerintahan baru.

Pertama, Indonesia harus segera lepas landas mengejar kemajuan dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk keluar dari *middle income trap*. Pembangunan Ekonomi diperkirakan terus berlanjut dengan pertumbuhan pada triwulan I 2024 sebesar 5,11% dan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,2% pada 2025. Angka ini perlu didorong agar lebih tinggi lagi, sehingga target ambisius mencapai 8% pertumbuhan per tahun dapat dicapai, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Terpilih pada tanggal 18 Juli 2024.

Kedua, untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi, isu kesehatan dan pendidikan di Indonesia juga menjadi perhatian penting. Presiden Terpilih menekankan pentingnya memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia. "Rakyat kita, bukan sumber daya alam kita, adalah sumber daya nomor 1 Indonesia," ujar Prabowo pada Juni 2024. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, remaja Indonesia (5-12 tahun) mengalami sejumlah beban gizi: sekitar 3,5% terlalu kurus, sekitar 7,8% kelebihan berat badan atau obesitas, dan sekitar 16,3 remaja (5-14 tahun) menderita anemia. Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, tercermin dari penurunan skor PISA 2022 dalam membaca, matematika, dan sains, dengan rata-rata skor yang lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

Ketiga, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas sektor pangan. Sektor pangan merupakan sektor strategis nasional yang diunggulkan. Dengan potensi lahan yang luas dan kondisi geografis yang mendukung, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan sektor ini. Salah satu contohnya, Indonesia dikenal sebagai produsen *crude palm oil* (CPO) terbesar dunia dengan *output* mencapai 50 juta ton per tahun. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat terdapat sekitar 31 juta ha kawasan hutan yang tidak memiliki tutupan hutan yang berpotensi menjadi lahan produktif. Menakar potensi lahan yang besar, kebutuhan pangan yang meningkat, krisis iklim yang kian mengkhawatirkan, dan program peningkatan pangan seperti *Food Estate* yang perlu digalakkan, Indonesia harus bergerak cepat

untuk menjawab tantangan-tantangan terkait pangan.

Keempat, Indonesia juga perlu mempercepat peningkatan implementasi *biofuel* untuk mendukung agenda swasembada energi.

Dengan potensi agroindustri dan luasnya lahan yang tersedia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan pengembangan produk-produk bioenergi, khususnya *biofuel*. Sayangnya, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan bahan baku *biofuel*, diantaranya dalam hal produktivitas sawit, legalitas lahan, dan akses pembiayaan untuk petani.

Kelima, birokrasi dan tata kelola keuangan yang kurang efektif mempengaruhi iklim kemudahan berusaha di Indonesia.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, diperlukan peningkatan investasi yang signifikan. Perbaikan iklim investasi dan usaha harus menjadi prioritas utama. Dari sisi birokrasi, salah satu pemicunya adalah proses perizinan yang kompleks dan tidak terintegrasi. Berdasarkan Laporan pemerintah Amerika Serikat tentang "2024 Investment Climate Statements: Indonesia" menggarisbawahi adanya sejumlah kendala dalam investasi di Indonesia, termasuk inefisiensi birokrasi, kesulitan dalam memperoleh izin, dan lemahnya penegakan kontrak dalam proses berinvestasi di Indonesia.

Selain iklim investasi yang kurang kompetitif, mekanisme penganggaran pemerintah saat ini dinilai kaku dan lebih berorientasi lebih pada pengeluaran (*spending*) dari pada hasil (*outcome*). Akibatnya, keberhasilan anggaran cenderung diukur dari sejauh mana anggaran dapat dihabiskan, bukan pada seberapa *outcome* dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hal ini menghambat kreativitas dan inovasi pada instansi negara dalam memanfaatkan anggaran secara lebih efektif dan produktif.

Keenam, Indonesia perlu menggalakkan pasar karbon sebagai agenda strategis nasional.

Indonesia adalah negara dengan emisi karbon terbesar ke-6 di dunia (1,2 GtCO₂eq di tahun 2022) dengan kontribusi sebesar 2,31% dari total emisi global pada tahun 2022. Di lain sisi, Indonesia memiliki 80% area penyerap karbon dunia, dengan potensi ekonomi hingga Rp8000 triliun. Meskipun sejumlah kebijakan telah diterapkan untuk memperkenalkan pasar karbon, optimalisasinya masih terkendala oleh regulasi dan *roadmap* yang belum memadai serta infrastruktur yang terbatas.

Dalam menyusun Visi, Asta Cita, dan program kerja periode 2024-2029, Prabowo-Gibran melihat beberapa tantangan strategis yang dihadapi demi mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. IBC, yang mempunyai semangat yang sama, melihat bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, IBC merumuskan 15 rekomendasi paket kebijakan berdasarkan kerangka acuan pengelolaan bangsa untuk Indonesia yang Berdaya Saing dan Sejahtera. Kerangka acuan ini terdiri dari 4 pilar utama: Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Negara, dan Inovasi.

15 rekomendasi paket kebijakan ini dirumuskan secara lebih spesifik melalui 15 bidang atau fokus area. Fokus area tersebut mencakup isu-isu berikut:

1. Hilirisasi SDA dan Maritim
2. Food Estate dan Penguatan Kemitraan Sektor Pertanian
3. Program Makan Bergizi Gratis
4. B50-B100, E10, dan Bioavtur
5. Sekolah Unggulan dan Guru Yang Berkualitas
6. Penyediaan Fasilitas Rumah Sakit Lengkap
7. Program 3 juta rumah
8. Digitalisasi Birokrasi
9. Sistem Logistik Nasional
10. BUMN Indonesia Incorporated & Integrasi Kebijakan Terpadu
11. Inovasi Produk Keuangan, Perluasan Pembiayaan untuk UMKM, Suku Bunga Rendah & Pembaharuan Kebijakan Fiskal-Makroekonomi
12. Pasar Karbon
13. 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik
14. Produksi Teknologi Maju dan Tepat Guna
15. Ekonomi kreatif & Industri Jasa

Rekomendasi paket kebijakan untuk masing-masing fokus area disusun secara modular, sehingga memungkinkan pembaca untuk memilih bagian-bagian yang paling relevan dengan minat dan bidangnya masing-masing, secara independen. Berikut adalah beberapa *highlight* rekomendasi kebijakan, antara lain:

1. Merealisasikan potensi penambahan 6-9 juta hektare lahan pertanian baru

Sebagai negara dengan potensi pertanian yang besar, Indonesia memiliki luas lahan pangan per kapita yang relatif rendah, bahkan lebih kecil dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand. Dengan mengoptimalkan pengelolaan tata ruang secara *fit for purpose*, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas lahan pertanian. Hal

ini pada gilirannya dapat mendukung ketahanan pangan nasional.

Rekomendasi:

- Penyatuan pengelolaan tata ruang dan tenurial dalam satu institusi dan menerapkan tata ruang *fit for purpose*.
- Memfokuskan tugas institusi kehutanan pada pengelolaan hutan dan kewenangan yang terkait lainnya tanpa mengatur masalah tata ruang atau tenurial.

2. Melakukan terobosan dalam eksekusi pembangunan menggunakan APBN

Pemerintah Indonesia memiliki dua mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran yang terpisah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang dilaksanakan oleh Bappenas. Regulasi yang berbeda dan tanggung jawab yang terpisah antara perencanaan dan penganggaran menyebabkan ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran.

Rekomendasi:

- Revisi UU KN dan UU SPPN menggunakan pendekatan "*money follows program*" bukan "*money follows function*."

3. Meningkatkan ketahanan energi menggunakan biodiesel

Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan realisasi implementasi B50-B100, namun target ini tampaknya akan sulit dicapai. Pada tahun 2023, produktivitas sawit nasional baru mencapai sekitar 50 juta ton CPO, dan proyeksi ke depan menunjukkan pertumbuhan yang stagnan atau tidak signifikan. Sedangkan, untuk mencapai implementasi B50, diperlukan sekitar 70 juta ton CPO. Salah satu penyebabnya adalah lambatnya progres peremajaan sawit yang baru mencapai 45% dari target tahap 1. Hal ini dapat berdampak pada penurunan produktivitas bahan mentah biodiesel dan juga memicu persaingan antara pasokan CPO untuk energi dan makanan. Untuk itu, perlu pendekatan baru untuk meningkatkan produktivitas sawit.

Rekomendasi:

- Meningkatkan produksi sawit dengan menyukseskan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
- Konversi lahan pertanian komoditas non unggulan sebagian menjadi lahan perkebunan sawit dan atau relaksasi moratorium.

4. Mempercepat realisasi potensi ekonomi dari pengelolaan karbon senilai Rp8000 triliun

Pasar karbon Indonesia berpotensi menghasilkan pendapatan yang besar, yaitu Rp3000 - 8000 triliun. Potensi ini bisa terealisasi jika ada iklim dan atau ekosistem yang kondusif untuk perkembangan pasar karbon, meliputi roadmap yang jelas, regulasi yang mendukung, dan infrastruktur yang memadai.

Rekomendasi:

- Pengembangan pasar karbon sebagai prioritas strategis nasional
- Pembentukan *Indonesia Carbon Market Alliance* untuk memajukan pasar karbon Indonesia bersama para stakeholder

5. Memastikan agenda Prioritas Presiden-Wakil Presiden Terpilih terealisasi

Peran Menteri Koordinator (Menko) saat ini terbagi dengan masing-masing Menko bertanggung jawab atas bidang tertentu, namun keterlibatan dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor masih terbatas. Ditambah lagi, *silo mentality* yang terbentuk di berbagai K/L menghambat koordinasi dan implementasi kebijakan.

Rekomendasi:

- Penyesuaian peran Menteri Koordinator sebagai Sistem Integrator (PMO Nasional) yang bertanggung jawab atas pengelolaan program lintas sektor dan memastikan agenda prioritas terealisasi.

Melalui buku putih 15 paket rekomendasi ini, IBC mengambil inisiatif untuk menjembatani dialog antara pemerintahan Prabowo-Gibran dan komunitas bisnis. Inisiatif ini diambil guna memperkuat komunikasi dan kolaborasi kedua pihak, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam menghadapi peluang dan tantangan di masa depan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.



Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas

Dalam menyambut agenda pembangunan pemerintahan kedepan, IBC berinisiatif untuk merumuskan dan memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Rekomendasi ini dikemas dalam bentuk buku putih yang berjudul *"15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Indonesia Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 – 2029."* IBC telah merumuskan kerangka kebijakan yang terdiri dari empat pilar utama—Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Negara, dan Inovasi—dengan 15 Fokus Area. Kerangka kebijakan ini telah mempertimbangkan agenda pembangunan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang diperkaya dengan pandangan dunia usaha untuk mendorong peningkatan daya saing dan kesejahteraan Indonesia.

Indonesian Business Council (IBC) merupakan asosiasi pemimpin bisnis dan industri di Indonesia yang memiliki visi mendorong peningkatan daya saing dan kesejahteraan Indonesia. Visi tersebut diwujudkan melalui penciptaan iklim kebijakan publik yang baik, yang mendorong peningkatan partisipasi serta kontribusi pelaku usaha swasta dalam memajukan perekonomian nasional Indonesia. Melalui penelitian, analisis data, dan rekomendasi kebijakan, IBC berupaya menciptakan lingkungan kebijakan publik yang kondusif guna meningkatkan kemakmuran bersama dalam rangka mencapai tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.



Indonesian Business Council (IBC)
Sequis Center Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 71
Jakarta Selatan 12190
Indonesia



business-council.id



[businesscouncil.id](https://www.instagram.com/businesscouncil.id)



[Indonesian Business Council](https://www.linkedin.com/company/indonesian-business-council)



[businesscouncil_id](https://www.youtube.com/channel/UC...)